**Strategi Kebijakan Untuk Meningkatkan Aksesibilitas dan Kesejahteraan Masyarakat: Rekonstruksi Infrastruktur Jalan di Dusun Rambutan, Desa Melati II**

**Yuli Adnes Saragih¹ Julia Ivanna²**

Falkultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan1,2

Email: [yuliadnezsaragih@gmail.com](mailto:yuliadnezsaragih@gmail.com)1 [juliaivanna@unimed.ac.id2](mailto:juliaivanna@unimed.ac.id2)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami strategi kebijakan pemerintah dan tingkat sejahterah masyarakat dalam infrastruktur jalan di dusun Rambutan,desa Melati II dalam pengaspalan.Selain itu tujuan penelitian ini program pembangunan infrastruktur jalan dalam strategi kebijakan pemerintah dan apa saja hambatan-hambatan pemerintah desa dalam kesejahteraan masyarakat dusun rambutan desa melati II. Metode yang digunakan penelitian adalah Metode deskriptif kualitatif. Hasil peelitian menunjukan bahwa berbagai strategi yang telah dianggar oleh pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Dusun Rambutan Desa Melati II . Strategi tersebut meliputi sangat minim akan alokasi anggaran, evaluasi kebutuhan infrastruktur, perizinan dan persiapan hukum, pengadaan tenaga kerja, pelaksanaan kontruksi dan pengawasan, keterlibatan masyarakatan, serta monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan infrastruktur, juga mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi akannya kemacetan pengaspalan pelaksanaan adalah kurangnya kebijakaan pemerintah dalam melakukan infrastktur dengan secara adil dalam setiap desa maupun dusun yang ada di kecamatan perbaungan kabupaten serdang bedagai demi kesejahteraan masyarakat setempat khususnya desa yang penulis teliti. .

**Kata Kunci**: Strategi, Kesejahteraan Masyarakat, Dan Infrastruktur

***Abstract***

*This research aims to find out and understand the government's policy strategy and the level of community prosperity in road infrastructure in Rambutan hamlet, Melati II village in asphalting. Apart from that, the aim of this research is the road infrastructure development program in the government's policy strategy and what are the village government's obstacles to prosperity the people of Rambutan hamlet, Melati II village. The research method used is a qualitative descriptive method. The research results show that various strategies have been budgeted by the government in developing road infrastructure in Rambutan Hamlet, Melati II Village. This strategy includes very minimal budget allocation, evaluation of infrastructure needs, permits and legal preparation, procurement of labor, construction implementation and supervision, community involvement, as well as monitoring and evaluation of infrastructure development planning, as well as identifying challenges and obstacles faced by asphalting implementation bottlenecks, namely lack of government policy in implementing infrastructure fairly in each village and hamlet in the Perbaungan sub-district, Serdang Bedagai district for the welfare of the local community, especially the village that the author studied.*

***Keywords****: Strategy, Community Welfare, and Infrastructure*

Lisensi Creative Commons  
*This work is licensed under a* [*Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional*](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*.*

**PENDAHULUAN**

Salah satu hal yang sangat penting sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi baik di pusat maupun di daerah adalah pembangunan jalan. Jalan juga memiliki banyak manfaat strategis, dimana salah satunya adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang berskala besar. Di Indonesia, penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan terbagi atas tiga kewenangan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah pusat berwewenang dalam penyelenggaraan jalan nasional dan jalan tol, pemerintah daerah provinsi/kota berwewenang dalam penyelenggaraan jalan provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota berwewenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. Penyelenggaraan jalan berarti kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan peraturan jalan. Jalan binaan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, dan penelitian dan pengembangan jalan. Jalan bangun adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan kontruksi, dan pengoperasian dan pemeliharaan jalan, dan jalan awasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pengembangan jalan. Pada kegiatan konstruksi pembangunan jalan, setiap unit pelaksanaan konstruksi selalu diawasi secara seksama oleh pemerintah sebagai pemilik proyek dan konsultan pengawas, sehingga sangat mustahil adanya penyimpangan mutu.

Pada kegiatan pemelirahaan jalan, pada dasarnya pemelirahaan rutin (rutine) dan berkala (periodic) dilakukan secara terjadwal setiap periode tertentu dan perbaikan jalan (betterment) dilakukan hanya pada kondisi kerusakan struktural jalan. Kerusakan jalan yang ada tidak mungkin terjadi pada mutu kontruksi, namun kemungkinan terjadi pada proses pemeliharaan yang disebabkan karena keterbatasan anggaran pemeliharaan jalan, namun itupun bukan merupakan kerusakan struktural seperti sering terlihat dilpangan saat ini. Faktor yang mempengaruhi kerusakan jalan yang ada saat ini adalah diakibatkan karena beban berlebih (overloading) dari kendaraan berat. Sekali saja terjadi kerusakan struktural dari suatu jalan maka akan berdampak secara efek kepada struktur jalan disekitarnya Strategi yang dijalankan pada sektor pemerintahan dapat dilihat upaya dari pemerintahdalam membuat strategi agar dapat tercapainya tujuan dimasa depan dengan Infratsruktur jalan adalah kebutuhan mutlak dalam sistem angkutan jalan raya.

Kinerja sistem transportasi jalan raya akanbergantung pada seberapa besar daya dukung prasarana jalan yangmampu disediakan untuk mencapai sasaran- sasaran pokok dalam suatu sistem transportasi. Pemerintah adalah sekelompok orang yang mempunyai peran penting dalam negara yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan tugasnya yang dalam arti melaksanakan tanggung jawab dan wewenang yang sah dalam melindungiserta meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Dalam teori pembangunan desa yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti malakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan lain-lain. Secara umum Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional, terutama yang menyangkut pewujudan perkembangan antardaerah yang seimbang dan pemerataan hasilhasil pembangunan, serta peningkatan pertahanan dan keamanan negara, dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial salah satunya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pendapatan penduduk desa dan memperlancar mobiltas masyarakat. Melihat kondisi ini, peniliti berusaha untuk mengungkapkan sebarapa besar pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga dapat terjawab bahwa pembangunan infrastruktur jalan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dusun rambutan,desa melati II.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi (1990:64) bentuk deskriptif adalah bentuk penelitian yang memusatkan pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat akual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki dalam sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Adapun jenis data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini adalah data perimer dan data sekunder yang bersifat kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara diantaranya: dokumen kuesioner, Wawancara,pengamatan,buku dan dari halaman web.teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik kualitatif.Menurut Farid (1997, h.152) bahwa analisa kualitatif adalah analisa terhadapdata yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubung-hubungkan fakta, data dan informasi di Dusun Rambutan, Desa Melati II, kabupaten serdang bedagai,kecamatan perbaungan. Informasi dalam penelitian ini sebagian jalan di desa tersebut belum di aspal berbeda dari desa lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik Observasi,Dokumentasi Dan Wawancara.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN**

Dusun rambutan desa melati II merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan perbaungan. Desa ini berada diperbatasan langsung dengan desa lainnya kecamatan perbaungan dan sekitarnya. Desa kampung juani memiliki luas 4.710 ha dari kota perbaungan. Dalam rangka penerapan hak asasi manusia bagi masyarakat dalam desa tersebut tentang pengaspalan jalan yang sudah dijalankan oleh pemerintah saat ini masih sedikit sangat di bingungkan bahkan masyarakat sekitarnya pun serasa ditipu oleh pemerintah dengan program-program pengaspalan bahkan pembuatan paret yang sudah di programkan.Undang-Undang desa menjamin hak warga atas informasi dan menegaskan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak warga atas informasi yang berlaku tertulis di dalam Pasal 82 Undang-Undang desa yang menyatakan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu pondasinya, dan kebebasan dalam memperoleh informasi merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka dalam program-program yang ada. Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris. Semakin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin akan dipertanggung jawabkan dengan semaksimal mungkin..

Pembangunan perdesaan mempunyai peran penting dalam konteks pembangunan pengaspalan atau proyek yang ada karena mencakupi bagian besar bagi pemerintah untuk melaksanakan proyek yang secara berlangsung dengan mengenai pembanguan pendesaan tentang pengaspalan yang seharusnya menerapkan prinsip-prinsip yang ada dimana prinsip tersebut: 1. Tranparansi(terbuka), 2. Partisipatif, 3. Dapat dinikmati masyarakat, 4. Dapat dipertanggung jawabkan (Akuntabilitas), dan 5. Berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan inilah dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh desa. Dengan diketahui prinsip-prinsip pembangunan bisa ditarik dengan kesimpulan bahwasanya untuk pembangunan ini juga seperti dengan berdemokrasi,yang artinya dari kita untuk kita dan untuk seluruh warga. Dengan demikian pemerintah perlu mengetahui bahwasannya hal tersebut dalam pembangunan harusnya sangat berorientasi pada hasil yang dapat dinikmati oleh seluruh warga desa dengan penggunaan jalan yang sangat layak dijalan kan di dekat perkotaaan Perbaungan.

Pembangunan infrastruktur perdesaan dilakukan dengan cara memperbaiki akses mobilisasi warga, melalui pengaspalan jalan dan penbuatan parit di Perbaungan. Beberapa desa / kelurahan Hingga januari 2021 proses pembangunan dan pengaspalan jalan perdesaan sudah berlangsung dengan total panjang jalan mencapai lebih dari 1.300 meter atau tergantung panjangnya jalan perdesaan. Hetifa Sj Sumarto(2003) menjelaskan bahwa seluruh proses pembangunan jalan ini dilakukan dengan basis partisipasi masyarakat, yakni masyarakat yang berperan langsung dalam merencanakan, melaksanakan, dan menikmati manfaat berbagai pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh pemerintah, Masyarakat mengidentifikasi kebutuhan, mengurus perizinan yang diperlukan dan secara bersama-sama merawat secara keberlangsungan manfaat infrastruktur ini. Lin Herlina (2003) juga menambahkan bahwa keuntungan lain dari partisipasi adalah meningkatkan kemampuan (empowerment) dalam pengertian meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mereka mampu berinisiatif sendiri dan mempengaruhi proses dan hasil pembangunan, meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mereka mampu mengambil tanggung jawab dalam pengelolaan proyek pembangunan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek.

Sebelum pengaspalan proses warga desa sudah mengetahui bahwa anggaran dana desa dari APBD belum mencukupin target dalam pengaspalan desa,oleh sebab itu pemerintah desa berusaha dengan proses yang cukup cepat dan baik,namun hal itu terbalik dengan visi-misi pemerintah dengan pembangunan pengaspalan desa, pemerintah yang lebih mengutamakan pembangunan pengaspalan yang prosesnya di dekat kantor pemerintah (bupati) atau bahkan jalan yang kurang di jalankan atau kurang dikunjungi oleh masyarakat yang ada disekitar kantor lebih dahulu proses pengaspalan. Warga desa Kampung Juani pun juga merasa kecewa dengan tindakan pemerintah pada saat itu dengan mengutamakan keperluan pribadi atau dengan kepentingan pribadi, maka jalan desa tersebut sangat tidak layak di jalankan dikarenakanya banyak lubang yang cukup dalam,bergelombang disetiap jalannya apalagi saat hujan datang.

Faktor penghambat pelaksanaan pembangunan dusun rambutan,desa melati II Berdasarkan hasil wawancara yang telah dtemukan di lapanagn bahwa hambatan dalam pelakasanaan pembangunan yaitu:

1. Peran Pemerintah dalam Perbaikan Jalan Desa. Perbaikan jalan desa adalah tanggung jawab pemerintah, baik itu pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa jalan desa diperbaiki secara rutin dan terawat dengan baik. Ini dapat dilakukan melalui alokasi anggaran yang memadai, kerjasama dengan pihak ketiga, serta pengawasan yang efektif terhadap proyek perbaikan jalan desa. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur pendukung lainnya, seperti jembatan dan saluran air, yang diperlukan untuk memperbaiki jalan desa secara menyeluruh. Ini melibatkan perencanaan yang matang dan kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah terkait.
2. Tantangan dalam Perbaikan Jalan Desa. Perbaikan jalan desa tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan yang umum dihadapi dalam perbaikan jalan desa antara lain:
3. Tingginya biaya perbaikan
4. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan jalan desa
5. Tingginya laju kemacetan lalu lintas
6. Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil
7. Perbedaan geografis dan iklim yang mempengaruhi kondisi jalan
8. Keterbatasan aksesibilitas ke daerah pedesaan

Tantangan-tantangan ini membutuhkan solusi yang kreatif dan solusi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat setempat. Dalam beberapa kasus, bantuan dari pihak swasta atau lembaga internasional juga diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya dan mengatasi masalah yang kompleks ini.

1. Solusi untuk Perbaikan Jalan Desa yang Efektif. Untuk mengatasi tantangan dalam perbaikan jalan desa, diperlukan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan:
   1. Peningkatan alokasi anggaran. Pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan desa. Ini akan memastikan bahwa jalan desa diperbaiki secara rutin dan terawat dengan baik. Selain itu, alokasi anggaran yang memadai juga akan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan mendesak dalam perbaikan jalan desa.
   2. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga. Pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, seperti perusahaan konstruksi, lembaga keuangan, atau organisasi non-pemerintah, dalam memperbaiki jalan desa. Kerjasama ini dapat melibatkan penyaluran dana, bantuan teknis, atau partisipasi dalam pengawasan proyek perbaikan jalan desa.
   3. Penyediaan pelatihan keterampilan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam perbaikan jalan desa sangat penting. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan keterampilan kepada masyarakat setempat, seperti pelatihan konstruksi jalan, inspeksi dan pemeliharaan jalan, serta manajemen proyek. Hal ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam merawat jalan desa secara mandiri.
   4. Pengembangan teknologi yang tepat. Teknologi yang tepat dapat mempercepat dan mempermudah proses perbaikan jalan desa. Penerapan teknologi modern, seperti penggunaan mesin, peralatan konstruksi yang canggih, atau material jalan yang tahan lama, dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas perbaikan jalan desa.
   5. Partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat setempat harus terlibat secara aktif dalam perbaikan jalan desa. Mereka dapat turut serta dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pemeliharaan jalan desa. Partisipasi ini akan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap jalan desa, serta memastikan keberlanjutan perbaikan jalan desa di masa depan.
   6. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga sangat penting dalam perbaikan jalan desa. Pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta untuk mendapatkan dukungan finansial dan teknis dalam perbaikan jalan desa. Sebagai imbalannya, perusahaan dapat mendapatkan manfaat jangka panjang berupa akses yang lebih baik ke pasar atau sumber daya lokal.
2. Manfaat Perbaikan Jalan Desa. Perbaikan jalan desa memiliki manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat dan perekonomian setempat. Beberapa manfaat utama perbaikan jalan desa antara lain:
   1. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas. Dengan adanya jalan desa yang baik dan terawat, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat akan semakin meningkat. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai fasilitas publik, seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan tempat ibadah, tanpa harus menghadapi kendala yang berarti. Ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat.
   2. Memperlancar distribusi barang dan jasa. Jalan desa yang baik dan terawat juga akan memperlancar distribusi barang dan jasa di daerah pedesaan. Petani dapat dengan mudah mengirim hasil panen ke pasar, masyarakat dapat dengan mudah mengakses barang kebutuhan sehari-hari, dan pengusaha dapat dengan mudah mengirimkan produk mereka ke berbagai pasar. Ini akan mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat dan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan.
   3. Meningkatkan pengembangan pariwisata. Perbaikan jalan desa juga akan membuka peluang pengembangan pariwisata di daerah pedesaan. Aksesibilitas yang baik akan membuat wisatawan lebih tertarik untuk mengunjungi dan menjelajahi keindahan alam, budaya, dan kerajinan lokal yang ada di desa-desa. Ini akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
   4. Mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Perbaikan jalan desa juga akan mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di daerah pedesaan. Dengan adanya jalan desa yang baik, masyarakat dapat lebih mudah mengakses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Selain itu, jalan desa yang baik juga akan mendorong investasi, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, di daerah pedesaan. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

**KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Rambutan, Desa Melati II, khususnya terkait dengan pengaspalan jalan, memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Namun, proses pembangunan tersebut masih dihadapkan pada beberapa kendala yang perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini tercermin dari ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan, yang seringkali dinilai kurang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi langsung dari masyarakat setempat. Transparansi yang kurang dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, serta memperkuat persepsi bahwa kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan umum. Kendala lainnya adalah terkait dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya yang memengaruhi kualitas dan keberlanjutan pembangunan. Meskipun pembangunan infrastruktur di desa merupakan tanggung jawab pemerintah, alokasi anggaran yang terbatas seringkali menjadi hambatan utama dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang diperlukan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan teknologi yang sesuai juga dapat memperlambat atau menghambat proses pembangunan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah konkret dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat benar-benar terwakili dalam kebijakan pembangunan yang diambil. Selain itu, peningkatan alokasi anggaran dan pemanfaatan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan infrastruktur. Peningkatan keterampilan masyarakat dalam merawat dan mengelola infrastruktur juga penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan. Melalui pelatihan dan pendidikan, masyarakat dapat menjadi mitra aktif dalam perawatan dan pemeliharaan infrastruktur, sehingga manfaat pembangunan dapat dinikmati secara berkelanjutan. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, pembangunan jalan desa yang baik dan terawat akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan perekonomian setempat. Meningkatnya aksesibilitas, distribusi barang dan jasa, pengembangan pariwisata, serta pembangunan sosial dan ekonomi akan menjadi dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh komunitas desa. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terlibat untuk berkolaborasi dan berkomitmen untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat desa.

Saran

Berdasarkan situasi yang diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan jalan desa di Dusun Rambutan, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan: Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat: Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan jalan desa dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pembangunan jalan desa. Alokasi Anggaran yang Memadai: Penting bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan jalan desa. Hal ini akan memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkualitas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pemberdayaan Masyarakat: Melalui pelatihan dan pendidikan, masyarakat perlu diberdayakan untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam merawat dan mengelola infrastruktur jalan desa. Ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengambil peran aktif dalam pemeliharaan jalan desa. Kolaborasi dengan Pihak Swasta: Pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan desa. Dukungan dari pihak swasta dapat membantu meningkatkan ketersediaan sumber daya dan teknologi yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur. Penerapan Teknologi yang Tepat: Penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan jalan desa. Pemerintah perlu memastikan bahwa teknologi yang digunakan sesuai dengan kondisi lokal dan memenuhi standar keamanan serta kualitas. Pengawasan dan Pertanggung jawaban yang Ketat: Diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan desa untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien. Pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur. Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan pelaksanaan pembangunan jalan desa di Dusun Rambutan, Desa Melati II dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmadi, A, Uhbiyati, N. (2001).Ilmu pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta.

David, F. R. (2002). Manajemen Strstegi. Jakarta: Prehalindo

Dra. Ambar Teguh Sulistiyani, M.Si, Andi Muflih Marsuq Muthaher, S.T (2019) Dukungan infrastruktur untuk daerah tertinggal, Jakarta

Hidayat, Rizal A. 2008. Manajemen Strategik. Model Balance Score Card: Kajian Tahap Formulasi Strategi, Jurnal Forum Ilmiah Indonesia. Volume 5 No.1

Kasmira, Alyas,Sudarmi, Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gowa (2020) 819 Volume 1, Nomor 3, 819-833.

Metodius P Laia,Rehmuli Karo Karo,Parlindungan Marpaung, Endri Kurniawan Laowo. (2024), Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Hilitotao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan, Vol. 9, No. 1, April : 16 – 25.

Nawawi (1990:64) Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dn R&D*”, Edisi , Cet.19, Bandung: ALFABETA

Pin Pin. Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(Pnpm) Mandiri Perdesaan Kabupaten Dairi. (2020) Vol. 4 No. 4 Oktober

Regan Vaughan1, Soma Gantika. (2023). Strategi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran, Volume 14, Nomor 2, 202-209